

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa wisata dianggap sebagai model utama untuk pengembangan pariwisata di masa mendatang, dengan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan potensi setempat. Pendekatan ini memfasilitasi pengembangan sumber daya alam, budaya, dan sosial yang tersedia di wilayah pedesaan menjadi pendorong ekonomi yang berkelanjutan (Kemenparekraf, 2022). Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menekankan signifikansi keterlibatan masyarakat pada setiap tahap pengembangan desa wisata, sehingga manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dinikmati secara merata oleh semua pihak. Regulasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Desa Wisata Berkelanjutan menetapkan penduduk sebagai subjek utama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi aktivitas wisata. (Kemenparekraf, 2022). Dengan demikian, keberhasilan desa wisata tidak hanya bergantung pada potensi alam dan infrastruktur, tetapi juga pada tingkat partisipasi, kapasitas, serta kesadaran masyarakat dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan daya tarik wisata.

Desa Claket yang berlokasi di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, secara geografis berada di wilayah lereng Gunung Welirang dengan basis penghidupan utama masyarakat yang bertumpu pada sektor agraris tradisional. Struktur mata pencaharian masyarakat didominasi oleh pertanian hortikultura budidaya sawi, wortel, pare serta subsektor peternakan sapi perah. Urgensi

pengembangan pariwisata di kawasan ini sangat krusial sebagai instrumen diversifikasi ekonomi saku keluarga guna mengurangi ketergantungan mutlak pada sektor primer yang rentan terhadap ketidakpastian cuaca harian dan fluktuasi harga tengkulak pasar konvensional. Komoditas lokal berupa hasil panen sayur, produksi susu perah segar, kluster industri kreatif rumahan *home industry* keripik khas desa, serta pemanfaatan rumah pribadi sebagai akomodasi *homestay* menjadi modal sosial dan modal ekonomi yang luar biasa besar untuk diintegrasikan sebagai produk paket wisata edukasi terpadu berbasis komunitas.

Hasil pengamatan di lapangan mengindikasikan adanya kesenjangan yang mencolok antara potensi alam yang melimpah dengan status pengembangan Desa Claket yang hingga kini masih berada pada tingkat "Rintisan" berdasarkan penilaian Jaringan Desa Wisata (Jadesta, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut berada pada tahap awal pengembangan dan belum berhasil mengoptimalkan pengelolaan daya tarik wisatanya secara mandiri. Hasil pengamatan lapangan dan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa pengelolaan potensi alam di kawasan ini masih dilaksanakan secara terpisah-pisah dan belum terintegrasi dalam satu kerangka pengembangan yang terstruktur. Keterbatasan kesadaran kolektif masyarakat dalam mengidentifikasi nilai strategis aset desa serta minimnya inisiatif mandiri untuk mengembangkan potensi yang tersedia menjadi kendala fundamental yang menghambat kemajuan pembangunan pariwisata. Lebih lanjut, dinamika pembangunan pariwisata di Desa Claket saat ini masih didominasi oleh pendekatan *top-down* yang digerakkan oleh segelintir individu dalam kelembagaan tertentu,

sementara sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis mereka dalam industri pariwisata.

Kesenjangan tata kelola ini diperumit oleh pola operasional antar-sektor pendukung yaitu pertanian, peternakan, *home industry*, dan *homestay* yang berjalan secara parsial tanpa adanya aturan pengelolaan bersama. Sektor penginapan atau *homestay* yang dikelola kelompok warga tertentu cenderung berkembang secara mandiri dan memicu ketimpangan pendapatan akibat sistem pembagian wisatawan yang belum merata. Kelompok petani hortikultura dan komunitas peternak sapi perah masih beroperasi sebagai entitas mandiri yang sering kali melakukan transaksi layanan wisata edukasi langsung dengan konsumen tanpa koordinasi satu pintu. Pihak industri kreatif rumahan keripik lokal pun lebih memprioritaskan aktivitas produksi komersial harian demi kelangsungan usaha akibat keterbatasan teknologi tradisional, sehingga belum terhubung ke dalam ekosistem pariwisata desa secara utuh. Pola pengelolaan yang berjalan sendiri-sendiri ini menciptakan fragmentasi kepentingan di wilayah Desa Claket, sehingga masyarakat luas yang berada di luar lingkaran pengurus inti kehilangan akses untuk berpartisipasi secara substantif dalam proses pengambilan keputusan strategis serta evaluasi terhadap kebijakan pariwisata di wilayah kedaulatan masyarakat.

Kondisi tata kelola yang terpisah-pisah tersebut mencerminkan adanya ketimpangan partisipasi yang nyata antar-tahapan pembangunan. Fenomena ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat di Desa Claket masih bersifat instrumental, di mana keterlibatan warga hanya digunakan untuk memenuhi aspek teknis operasional harian saja, namun belum menyentuh level partisipasi substantif

yang memberikan ruang bagi warga untuk menentukan keberlanjutan masa depan desa mereka. Ketimpangan ini terlihat jelas dari bagaimana peran aktif masyarakat cenderung memuncak pada pelaksanaan fisik di lapangan, namun menyusut drastis pada proses perencanaan awal maupun evaluasi kebijakan. Pola keterlibatan yang tidak seimbang ini pada akhirnya berimplikasi langsung pada rendahnya rasa memiliki, komunitas lokal serta ketidakefektifan distribusi manfaat ekonomi secara merata di tingkat desa. Dominasi kelompok pengurus tertentu dan kelemahan integrasi antar-sektor pariwisata di Desa Claket berpotensi memicu konflik kepentingan atau dominasi elit lokal, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan daya tarik wisata tersebut jika kebutuhan sosiologis warga setempat terus terabaikan.

Kondisi kelemahan tata kelola internal ini menegaskan urgensi partisipasi masyarakat sebagai penyeimbang kekuasaan dalam manajemen destinasi pariwisata. Literatur terkini menegaskan bahwa dalam model pengembangan pariwisata pedesaan, partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan prasyarat keberlanjutan sosial-ekonomi (Sari & Pratama, 2022). Masyarakat yang tidak dilibatkan secara nyata dalam pengambilan keputusan strategis cenderung mengalami alienasi atau bersikap acuh tak acuh terhadap aset desa yang sebenarnya menjadi sumber penghidupan mereka. Temuan ini diperkuat oleh fakta bahwa ketiadaan ruang partisipasi yang bermakna dapat memicu konflik kepentingan dan mengurangi rasa kepemilikan masyarakat terhadap daya tarik wisata edukasi lokal (Widjaja, 2024). Oleh karena itu, Pemahaman bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa kelemahan

pengelolaan internal tidak menggerus peran strategis warga lokal dalam pembangunan desa wisata.

Berdasarkan temuan awal dari pengamatan lapangan dan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, terungkap bahwa kajian mengenai Desa Wisata Claket yang telah dilaksanakan sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek pendampingan teknis dan pengembangan kapasitas kelembagaan (Hasanah dkk., 2024), belum menyentuh analisis kritis mengenai bagaimana struktur kekuasaan dan dinamika partisipasi warga di tengah tarikan kepentingan berbagai pengelola sektoral. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, yaitu sejauh mana warga desa memiliki posisi tawar dalam menentukan masa depan desa mereka di tengah kepungan kepentingan organisasi eksternal. Sehubungan dengan kondisi tersebut, peneliti merasa *urgens* untuk melakukan studi lebih lanjut dengan judul: "ANALISIS BENTUK DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA WISATA CLAKET, KECAMATAN PACET, KABUPATEN MOJOKERTO". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pola interaksi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, demi terciptanya tata kelola pariwisata yang lebih terintegrasi dan inklusif.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada upaya memahami secara mendalam mengenai bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Claket. Partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam pengelolaan desa wisata karena

masyarakat lokal berperan sebagai pelaku utama yang terlibat dalam berbagai aktivitas pariwisata, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi pengembangan wisata. Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana partisipasi masyarakat terbentuk dalam konteks pengelolaan desa wisata, baik dalam bentuk keterlibatan langsung maupun tidak langsung, tingkat keaktifan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta peran masyarakat dalam mendukung keberlanjutan aktivitas pariwisata lokal. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana distribusi peran antara kelompok pengelola seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan masyarakat umum dalam menjalankan aktivitas pariwisata di Desa Wisata Claket.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis bentuk partisipasi masyarakat yang meliputi partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan wisata. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan keterlibatan, inisiatif, serta kontribusi nyata masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Dengan memahami bentuk dan tingkat partisipasi tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai dinamika keterlibatan masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam konteks pengelolaan desa wisata. Dari fokus penelitian tersebut, penulis kemudian merumuskan permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan Desa Wisata Claket?”. Melalui temuan dalam penelitian ini, yang dihasilkan ditargetkan mampu menyajikan deskripsi riil terkait model kontribusi penduduk lokal di dalam pembangunan kawasan wisata,

sekaligus menyumbang pemikiran teoritis untuk membedah fluktuasi partisipasi warga setempat. Dimensi keterlibatan tersebut diposisikan sebagai salah satu determinan yang mendasari terciptanya keberlanjutan tata kelola desa wisata secara jangka panjang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Tujuan utama dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis komprehensif terkait wujud nyata dan tingkatan partisipasi warga setempat dalam menyokong program pengembangan kawasan Desa Wisata Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi bentuk kontribusi nyata masyarakat (wujud ide, tenaga, keterampilan, dan materi) pada setiap siklus manajemen daya tarik berdasarkan Teori Tahapan Pengembangan Pariwisata Prabawati (2013) yang meliputi fase perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Menganalisis tingkat kualitas partisipasi masyarakat pada masing-masing tahapan tersebut menggunakan Teori Tipologi Tosun (1999) guna mengukur derajat kedaulatan suara warga (*spontaneous*, *induced*, atau *coercive participation*).
3. Mendeskripsikan dinamika keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pariwisata di Desa Wisata Claket.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran baru bagi kemajuan ilmu pariwisata, khususnya dalam memahami seberapa jauh warga lokal ikut serta mengelola desa wisata mereka. Hasil dari kajian ini ditargetkan mampu melengkapi teori-teori yang sudah ada mengenai wujud dan derajat keterlibatan masyarakat di setiap jenjang kegiatan, mulai dari merancang program, menjalankan operasional, hingga menilai hasil kerja. Selain itu, tulisan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan teoretis bagi penelitian di masa depan yang ingin meneliti lebih dalam tentang dinamika pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Pemerintah daerah, sebagai bahan evaluasi dan dasar kebijakan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pengelolaan desa wisata.
2. Masyarakat Desa Claket, sebagai pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran aktif dalam setiap tahapan pengembangan desa wisata, sehingga dapat mendorong kesadaran kolektif dalam menjaga keberlanjutan aktivitas pariwisata dan pemanfaatan potensi lokal.
3. Institusi pendidikan, sebagai sumber referensi ilmiah dan bahan kajian akademik bagi mahasiswa maupun peneliti di bidang pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan studi partisipasi masyarakat dan pengembangan desa wisata.